Dual Approach Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan

Akhmad Fauzi

Pendahuluan

Begitu banyak keinginan dan harapan yang ditujukan kepada pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu harapan yang seringkali disampaikan oleh para ekonom di media massa adalah bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu adalah bahwa kebijakan ekonomi tersebut dapat memenuhi keinginan pasar dengan beberapa indikator seperti tingkat suku bunga yang rendah, kebijakan investasi yang kondusif, nilai tukar rupiah yang stabil, dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Harapan seperti ini lebih didasarkan pada pemikiran yang oleh Preston Miller, seorang professor terkemuka, disebut sebagai *Rocket Ship Economy*. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi lebih diarahkan kepada kebijakan stabilitas makro dimana ekonomi lebih diarahkan pada *full employment*, dan *non-inflationary path* (inflasi yang rendah) persis seperti petugas pengendali roket agar tetap berada pada orbitnya. Untuk menjaga stabilitas tersebut para pengambil kebijakan kemudian menggunakan instrumen-instrumen seperti pajak dan uang dasar (*base money*) persis seperti pengendali roket menggunakan tombol pengatur.

Harapan tersebut dalam beberapa hal tentu sah-sah saja. Siapa yang tidak ingin rupiah yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, dan sebagainya? Namun apakah itu sudah cukup sebagai suatu harapan yang dapat membawa perubahan kepada pembangunan ekonomi Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan?. Tentu saja tidak. Untuk itu diperlukan pendekatan baru yang harus mengubah pola pembangunan ekonomi kita selama ini. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi yang akan dijalankan bukan saja bersifat *market friendly*, namun juga bersifat "*resource friendly*" (ramah terhadap sumber daya alam dan lingkungan), yang selama ini tidak pernah dikedepankan.

Market Friendly versus Resource Friendly

Bagi penulis, kebijakan ekonomi yang bersifat *market friendly* adalah "*necessary condition*", sementara kebijakan ekonomi yang bersifat *resource friendly* merupakan "*sufficient condition*" bagi pembangunan ekonomi

Indonesia lima tahun mendatang. Mengapa kebijakan ekonomi yang *resource friendly* ini diperlukan? Berbagai peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan seperti kasus pencemaran akibat penambangan di Teluk Buyat, penggundulan dan kebakaran hutan, pencemaran udara, pencemaran wilayah pesisir dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi keinginan pasar semata, pada akhirnya hanya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Dan manakala sumber daya alam dan lingkungan telah terdegradasi, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Sejarah telah membuktikan bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak "*resource friendly*" juga telah menjadi pemicu kehancuran suatu bangsa. Sebagai contoh, meski Edward Gibbon menyatakan bahwa barbarisme dan konflik etika menjadi penyebab jatuhnya kekaisaran Romawi Kuno, namun studi oleh Dale dan Carter menunjukkan bahwa degradasi lahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang berlebihan justru menjadi katalis bagi runtuhnya kekaisaran tersebut. Studi lain oleh Naveh (1974) dan Hughes (1975) serta Groenman-van Waateringe (1983) kesemuanya membuktikan bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan menjadi menyebab runtuhnya peradaban-peradaban di masa lalu. Contoh lain yang cukup spektakuler adalah hancurnya kerajaan Angkor di Kamboja pada awal abad pertengahan. Kerajaan yang pada waktu itu, merupakan *advanced civilization* (penduduk London pada periode yang sama cuma 20.000 jiwa, sementara Angkor sudah berpenduduk hampir 200 000 jiwa) dengan sistem ekonomi yang tertata rapi dan irigasi pertanian yang terbilang modern, dalam kurun waktu 200 tahun kemudian tenggelam. Setelah diteliti lebih dalam, kehancuran peradaban tersebut ternyata dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang *overheating* tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang ada.

Demikian juga pada peradaban modern saat ini, meski kita menyaksikan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan yang tidak pernah dicapai pada abad-abad sebelumnya, namun peningkatan standar hidup tersebut juga harus dibayar mahal oleh peningkatan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sebagai contoh, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pencemaran di wilayah pesisir saja tidaklah sedikit. UNEP memperkirakan bahwa kerugian ekonomi global dalam bentuk

Indonesia lima tahun mendatang. Mengapa kebijakan ekonomi yang *resource friendly* ini diperlukan? Berbagai peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan seperti kasus pencemaran akibat penambangan di Teluk Buyat, penggundulan dan kebakaran hutan, pencemaran udara, pencemaran wilayah pesisir dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi keinginan pasar semata, pada akhirnya hanya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Dan manakala sumber daya alam dan lingkungan telah terdegradasi, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Sejarah telah membuktikan bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak "*resource friendly*" juga telah menjadi pemicu kehancuran suatu bangsa. Sebagai contoh, meski Edward Gibbon menyatakan bahwa barbarisme dan konflik etika menjadi penyebab jatuhnya kekaisaran Romawi Kuno, namun studi oleh Dale dan Carter menunjukkan bahwa degradasi lahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang berlebihan justru menjadi katalis bagi runtuhnya kekaisaran tersebut. Studi lain oleh Naveh (1974) dan Hughes (1975) serta Groenman-van Waateringe (1983) kesemuanya membuktikan bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan menjadi menyebab runtuhnya peradaban-peradaban di masa lalu. Contoh lain yang cukup spektakuler adalah hancurnya kerajaan Angkor di Kamboja pada awal abad pertengahan. Kerajaan yang pada waktu itu, merupakan *advanced civilization* (penduduk London pada periode yang sama cuma 20.000 jiwa, sementara Angkor sudah berpenduduk hampir 200 000 jiwa) dengan sistem ekonomi yang tertata rapi dan irigasi pertanian yang terbilang modern, dalam kurun waktu 200 tahun kemudian tenggelam. Setelah diteliti lebih dalam, kehancuran peradaban tersebut ternyata dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang *overheating* tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang ada.

Demikian juga pada peradaban modern saat ini, meski kita menyaksikan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan yang tidak pernah dicapai pada abad-abad sebelumnya, namun peningkatan standar hidup tersebut juga harus dibayar mahal oleh peningkatan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sebagai contoh, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pencemaran di wilayah pesisir saja tidaklah sedikit. UNEP memperkirakan bahwa kerugian ekonomi global dalam bentuk

penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh pencemaran laut telah mencapai lebih dari US$ 12,8 milyar per tahun. Nilai ini hampir mendekati separuh dari dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program konservasi global dalam rangka menjaga ekosistem dunia dalam kondisi yang sehat.

Ada beberapa alasan penting mengapa kebijakan ekonomi yang bersifat *resource friendly* ini sangat dibutuhkan di masa depan, khususnya bagi Indonesia momentum perubahannya sedang terjadi saat ini.

Pertama, pendekatan kebijakan ekonomi yang mengandalkan *market friendly* semata akan mengalami defisiensi akibat fenomena *Newtonian* di dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Fenomena yang saya pinjam dari Edward Olson tersebut mengacu pada situasi dimana sebagaimana hukum fisika, teori ekonomi dibangun dari model yang sederhana untuk memahami perilaku pasar serta *arrangement* ekonomi yang kompleks. Sama halnya dengan hukum fundamental fisika sendiri yang tidak cukup untuk membangun sebuah pesawat terbang, demikian juga halnya teori keseimbangan umum ekonomipun tidak cukup digunakan untuk memenuhi keinginan perilaku ekonomi dalam kondisi optimal dan stabil. Dengan demikian akibat fenomena *Newtonian* tersebut pendekatan ekonomi yang *market friendly* sekalipun tidak akan cukup untuk menjawab permasalahan yang menjadi kepedulian utama masyarakat global menyangkut peranan sumber daya alam, penurunan kualitas sumber daya dan lingkungan serta kuatnya pengaruh eksternalitas terhadap menurunnya kualitas lingkungan global.

Perlu pula disadari bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar, dalam jangka panjang akan memicu pola konsumsi yang tinggi yang kemudian menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Kedua kekuatan tersebut akan menyebabkan terjadinya tekanan yang berat terhadap lingkungan atau *environmental stress*. Studi yang dilakukan oleh Jyoti Parikh (UNCED) misalnya menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pola konsumsi dan kerusakan lingkungan ini terjadi. Ia menunjukkan bahwa negara maju dengan 24% total penduduk dunia membutuhkan konsumsi 50% sampai 90% komoditas dunia. Tingginya konsumsi per kapita negara maju tersebut tidak saja harus dipenuhi dari sumber daya alam mereka, tapi juga dipenuhi dari negara-negara berkembang melalui perdagangan international. Industri-industri di negara berkembang dengan motif memperoleh devisa yang tinggi kemudian secara sporadis

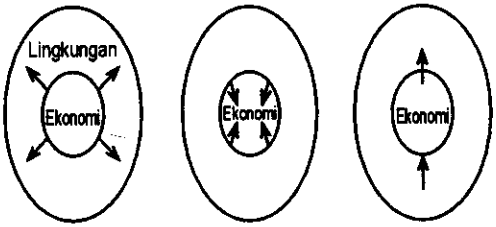
menggenjot produksi untuk kebutuhan konsumsi tersebut dengan sering mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Vandana Shiva, seorang *environmentalist* yang sangat disegani dunia bahkan kemudian menggambarkan situasi ini dalam bukunya *Stolen Harvest* sebagai *pembajakan* pangan oleh negara maju atas negara berkembang.

Kedua, pendekatan kebijakan ekonomi yang *market friendly* juga cenderung bersifat *hermetic* artinya cenderung terisolasi dari kompleksitas perilaku manusia dan kendala lingkungan. Akibatnya meski indikator-indikator ekonomi yang mengacu ke keinginan pasar dapat dengan mudah diprediksi dengan model-model yang canggih dan kompleks, namun sering menemui kegagalan. Ini terjadi karena sifat *hermetic* dari pendekatan kebijakan yang bersifat *market friendly* semata tanpa melihat apa yang terjadi pada perubahan institusi yang mengatur dan mengendalikan sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan melihat beberapa defisiensi dari kebijakan ekonomi *market friendly* di atas, maka *dual approach* antara kebijakan ekonomi yang *market friendly* dan *resource friendly* sangatlah diperlukan.

Evolusi ke pendekatan *dual approach* tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 1 berikut. Pada kebijakan ekonomi yang mengandalkan pasar semata maka indikator ekonomi diarahkan untuk mengekspansi batas-batas subsistem ekonomi sehingga menembus keseluruhan sistem lingkungan yang ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah sistem ekonomi makro secara keseluruhan dengan menginternalisasikan seluruh masalah yang ditimbulkan, sehingga seolah-olah *"everything is marketed"* (seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan dapat ditransaksikan di pasar). Sebaliknya pada sistem yang mengedepankan konservasi semata, maka ruang gerak ekonomi dipersempit sehingga porsi lingkungan menjadi besar. Pendekatan inipun menjadi *"absurd"* manakala dihadapkan pada situasi negara berkembang seperti Indonesia ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan dan menyehatkan sumber daya alam dan lingkungan. *Dual approach* mencoba mengakomodasikan kekurangan-kekurangan dari kedua pendekatan tersebut ketika kendala ekosistem dan lingkungan dapat dikendalikan dengan menginjeksi penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan dari manfaat yang diperoleh dari sistem

ekonomi. Pendekatan ini juga dapat mendelinieasi batasan-batasan di mana kebijakan pasar boleh dijalankan dan di mana tidak dapat diterapkan.

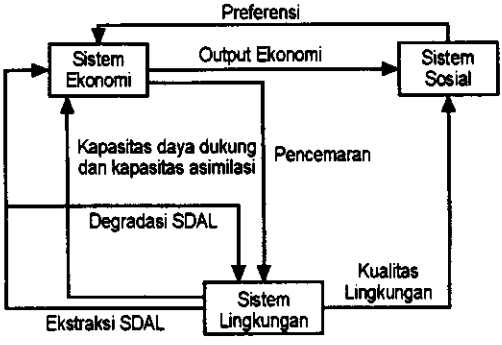


Gambar 1. Pandangan ekonomi dan lingkungan (diadopsi dari Daly dan Farley, 2004).

Gambar 2 berikut ini menggambarkan interkoneksi kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial melalui *feedback loop*. Dalam pendekatan *dual approach* dua hal yang menjadi perhatian utama adalah :

- Terjadinya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas ekonomi (sistem ekonomi)
- Terjadinya dampak ekonomi yang disebabkan oleh perubahan dalam sistem lingkungan

Dengan kata lain, perturbasi (gangguan) yang terjadi pada sistem lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi dapat diakomodasikan dalam struktur kebijakan ekonomi makro yang ada. Di sisi lain, ekstraksi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan juga menjadi *loop* dalam interkoneksi antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan, dengan demikian sistem ekonomi akan bersifat "*resource friendly*" sementara sistem lingkungan juga dapat diakomodasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan melihat *feed back* degradasi lingkungannya. Pada *dual approach* ini juga tidak dilupakan sistem sosial yang menjadi penunjang keseimbangan dua sistem ekonomi dan lingkungan tadi termasuk didalamnya aspek institusi yang mengendalikan preferensi dan aturan main yang mengatur perubahan kualitas lingkungan.



Gambar 2. Integrasi Pertumbuhan Ekonomi yang Ramah Lingkungan (dimodifikasi dari Duraiappah, 2003).

lingkungan yang terjadi (*spread the pain*). Intinya adalah bahwa masalah lingkungan, dalam bahasa latin, disebut sebagai *Caveat Venditor* yang artinya mereka yang memproduksi kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi terhadap timbulnya *defect* yang terjadi pada *natural capital*.

Akhirnya, banyak bukti hasil studi yang menunjukkan eratnya keterkaitan antara penanganan kebijakan ekonomi sumber daya dan lingkungan dengan kestabilan politik di suatu negara. Hasil studi Deacon (1994) di 120 negara misalnya menunjukkan bahwa penggundulan hutan (*deforestation*) dan degradasi lahan yang terjadi di negara-negara tersebut dipicu oleh iklim poilitik yang memicu investasi pada keinginan pasar semata. Akibatnya justru menimbulkan gejolak politik (*political turmoil*) yang dapat menjadi *"wash out effect"* atau pencuci berbagai keberhasilan-keberhasilan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Daftar Pustaka

Barbier, E.B. and T.Homer Dixon. 1996. *Resource Scarcity,Institutional Adaptation and Technical Innovation: Can Poor Countries Attain Endogenous Growth?*. University of Toronto.

Daly, H.E., and J. Farley. 2004. *Ecological Economics: Principle and Application*. Island Press. Washington

Deacon, R.T. 1994. " Deforestation and the Rule of Law in a Cross-Section of Countries ". *Land Economics* 70(4) 414-430.

Duraiappah, A.K. 2003. *Computation Models in the Economics of Environment and Development*. Kluwer Academic Publishers.

Greene, K. (1986). *The Archaeology of the Roman Economy. Berkeley*: University of California Press.

Groenman-van_Waateringe, W. " *The Disasterious Effect of the Roman Occupation* " In. *Roel Brandt and Jan Slofstra (eds), Roman and Native in the Low Countries: Spheres of Interaction*, British Archaelogical Reports.

Miller, Preston J (ed). 1994. *The Rational Expectation Revolution: Readings from the Front Line.* The MIT Press, London.

Nave, Z., and Dan, J. (1973) "*The Human Degradation of Mediterranean Landscapes in Israel* ", In F. Castri and H.Money (eds) *Mediterranean Type Ecosystems- Origin and Structure*. Berlin Springer-Verlag

Parikh, J., 1996. Consumption Pattern: " The Driving Force of Environmental Stress ". In P.H. May and R.S. da Motta. 1996. *Pricing the Planet: Economic Analysis for Sustainable Development*. Columbia University Press. New York.

Shiva, V. 2000. *Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply*. South End Press. Cambridge.M.A. Wilson, E.O. 1998. Consilience: *The unity of Knowledge. Vintage Book*. New York.

Wilson, E.O. 1998. Consilience : *The Unity of Knowledge*. Vintage Book. New York.